



Peran Pemerintah Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kelurahan Amal Bakti Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir

¹⁾Rianto, ²⁾Suherry, ³⁾Dwiniati, ⁴⁾Agustina Riska Ayu

¹⁾Program Studi Sosiologi STISIPOL Raja Haji

^{2),4)}Ilmu Pemerintahan STISIPOL Raja Haji

³⁾Administrasi Publik STISIPOL Raja Haji

Email: rianto@gmail.com

Abstract

Amal Bakti Village is one of the villages located on the Guntung River, Kateman District. The average area in Amal Bakti Village has problems with infrastructure development, especially connecting roads, as access for the community. The road in Amal Bakti Village is still dirt and only partially paved, making it difficult to travel when it rains heavily. The purpose of this study is to find out the role of the Village Government in Planning for Infrastructure Development in Amal Bakti Village. In this study the theory used according to Siagian (2000: 142-150). In this study, a sample of 5 people was taken. The data analysis technique used in this research is descriptive qualitative. Based on the results of the study, it can be concluded that the role of the Village Government in Road Infrastructure Development Planning (Study in Amal Bakti Village, Kateman District, Indragiri Hilir Regency) is not optimal, this is because there are still many damaged infrastructure developments, the government conducts musrenbang in determining development priorities, but some developments that occur outside of deliberation, then often encounter obstacles such as lack of program socialization or otherwise the village community does not respond or participate in programs promoted by the government. The suggestions that can be conveyed are that the Government must be able to see priority road construction, including those that are frequently passed and become important access for the community. There must be deliberation by involving the community to hear suggestions and input so that development is more targeted.

Keywords: Role of Government, Development, Infrastruktur

Abstrak

Kelurahan Amal Bakti adalah salah satu Kelurahan yang ada di Sungai Guntung Kecamatan Kateman. Rata-rata wilayah yang ada di Kelurahan Amal Bakti memiliki permasalahan dengan pembangunan infrastruktur khususnya jalan-jalan penghubung, sebagai akses bagi masyarakat. Jalan di Kelurahan Amal Bakti masih tanah dan hanya baru sebagian yang diaspal, sehingga sulit untuk berpergian jika hujan deras. Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Perencanaan Pembangunan infrastruktur di Kelurahan Amal Bakti. Dalam penelitian ini teori yang digunakan teori menurut Siagian (2000: 142-150). Dalam penelitian ini diambil sampel 5 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deksriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan yaitu Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Di Kelurahan Amal Bakti Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir) belum optimal, hal ini dikarenakan masih banyaknya pembangunan infrastruktur yang rusak, pemerintah melakukan musrenbang dalam menentukan prioritas pembangunan, namun beberapa pembangunan yang terjadi diluar musyawarah, kemudian sering kali di temui hambatan seperti kurangnya sosialisasi program ataupun sebaliknya masyarakat desa kurang merepons atau ikut berpartisipasi dalam program yang digalakkan oleh pemerintah. Ad apun saran yang dapat disampaikan adalah Pemerintah harus mampu melihat pembangunan jalan yang prioritas termasuk



yang sering dilalui dan menjad akses penting masyarakat. Harus ada musyawarah dengan mengikutsertakan masyarakat untuk mendengar saran dan masukan agar pembangunan lebih tepat sasaran.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pembangunan, Infrastruktur

PENDAHULUAN

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah adalah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah. karena pemerintah daerah memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah merupakan kegiatan utama pemerintahan daerah, karena itu perencanaan pembangunan daerah membutuhkan partisipasi seluruh unsur pemerintahan daerah (stakeholders) yang ada di daerah tersebut. Salah satu pembangunan yang menjadi perhatian adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan suatu kawasan. Pembangunan infrastruktur yang penting adalah jalan. Pembangunan infrastruktur jalan yang memadai merupakan hal yang penting karena mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Suatu daerah jika memiliki infrastruktur jalan yang baik maka perekonomiannya dapat mengalami peningkatan, sebaliknya suatu daerah yang kebutuhan infrastruktur jalannya kurang baik/tidak terpenuhi maka perekonomian daerahnya dapat mengalami penurunan. Peningkatan perekonomian suatu daerah akan menciptakan kesejahteraan masyarakat sehingga pembangunan infrastruktur jalan sangat penting.

I Ketut Sumadiasa, dkk (2016) Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional maupun regional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu negara maupun daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersedian infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Inilah yang menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi. Untuk mempercepat penyedian infrastruktur berdasarkan penelitian Posumah (2015) dimana Pemerintah memberikan dukungan dengan memberikan kompensasi dalam bentuk kerja sama investasi, subsidi, garansi dan penghapusan pajak sebagaimana tertuang dalam peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2005. Kompensasi diberikan kepada

proyek-proyek infrastruktur yang lolos dalam penyaringan KKPI (Komite & Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur) dan Komite Pengelolaan Resiko Departemen Keuangan (KPRDK). Perpres No. 67 Tahun 2005 merupakan pengganti keputusan Presiden No. 7 Tahun 1989. Perpres baru ini bertujuan untuk mengakomodasi perubahan paradigma dalam kerjasama pemerintah dengan badan usaha swasta dalam penyedian infrastruktur, antara lain berupa penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah konsep desentralisasi terbelah dan dilepas satu persatu menjadi tiga pilar utamanya, yakni Otonomi Daerah, Pemerintahan Desa dan Pemilihan Kepala Daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasikan kepada kepentingan masyarakat. Pembangunan otonomi daerah lebih menitikberatkan pada level Kabupaten/Kota, ini dirasakan sudah cukup tepat untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Menarik untuk di lihat, pergeseran kebijakan desentralisasi khusnya aturan atau regulasi telah berimplikasi langsung kepada perubahan konsep Pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pemerintah kelurahan merupakan pemegang kendali dalam pembangunan di wilayah kelurahan. Oleh karena itu lurah beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga maju mundurnya pembangunan di kelurahan tergantung dari kinerja pemerintah kelurahan dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk turut serta di dalam pembangunan. Kelurahan bertanggungjawab terhadap perencanaan pembangunan termasuk pembangunan infrastruktur, kelurahan melakukan musrenbang, dimana musrenbang adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang kelurahan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan. Dengan adanya Musrenbang diharapkan akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan kelurahan, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar kelurahan.

Dalam pembangunan perlu adanya perencanaan. Perencanaan merupakan syarat bagi terlaksananya proses pembangunan yang baik. Akan tetapi walaupun demikian perencanaan tidaklah berarti sebagai jaminan penuh bagi keberhasilan pencapaian tujuan, walaupun pelaksanaan kegiatan telah diawali dengan perencanaan yang matang, namun sering timbul hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut. Hambatan-hambatan tersebut harus benar-benar diperhatikan dalam perencanaan pembangunan tingkat Desa maupun

Kelurahan. Olehnya ketetapan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan adalah mutlak harus disertai dengan kesadaran yang penuh kesungguhan serta kemauan baik dari setiap unsur yang tidak terlibat langsung di dalam pembangunan tersebut.

Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka Lurah sebagai Kepala Kelurahan memegang peranan yang menentukan. Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kait-mengkait termasuk tugas pembangunan yang multi dimensional.

Sebagaimana penyelenggaraan pemerintahan di desa yang merupakan wilayah settingkat dengan kelurahan, yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005 ditegaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Salah satu pembangunan yang penting adalah pembangunan infrastruktur jalan, Jalan adalah sarana transportasi untuk menghubungkan tempat satu ke tempat lainnya, jalan juga merupakan salah satu infrastruktur untuk menunjang dan memperlancar atau mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat baik ekonomi mikro ataupun makro, jalan juga sebagai salah satu pembatas antar wilayah, gedung, wilayah administrasi.

Kelurahan Amal Bakti adalah salah satu Kelurahan yang ada di Sungai Guntung Kecamatan Kateman yang memiliki wilayah daratan, sebagian besar masyarakatnya baik langsung maupun tidak langsung bertempat tinggalan didaratan. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, hal tersebut adalah salah satu untuk mempermudah masyarakat untuk berpergian kepusat daerah atau perbelanjaan dan masyarakat juga dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti pemasaran hasil pertaniannya, mengangkut mengangkut hasil pertanian agar lebih mudah. Ada 16 RT dari 2 RW yang ada di Kelurahan Amal Bakti, beberapa wilayah atau RT untuk pembangunan infrastruktr memang masih terbatas, berikut perencanaan pembangunan infrastruktur yang sudah masuk dalam musrenbang namun hingga saat ini belum terlaksana :

Tabel 1. Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Amal Tahun 2019

No	Wilayah	Perencanaan	Keterangan hingga 2020
1	RT 013	Pembangunan Dermaga di RT 01 Suak Jangkang, Pembangunan Jalan Penghubung.	Belum dilakukan pembangunan

No	Wilayah	Perencanaan	Keterangan hingga 2020
		Pembangunan gorong-gorong,Pengadaan alat musik Tradisional sedangkan untuk wilayah	
2	RT 09	bangunan Dermaga,Pengadaan tranportasi bot/ Pompong	Bangunan dermaga belum dilakukan
3	RT 02	Pembangunan Jalan Penghubung. Pembangunan Jembatan, Pengadaan Tabung oksigen.	Jalan masih rusak
4	RT 10	Pembangunan Dermaga	Belum ada pembangunan
5	RT 03	Pembangunan Jl. Penghubung	Jalan masih rusak
6	RT 04	Suak jangkang Perehapan Jembatan. Perehapan Surau, Pengadaan anggota Bidan dan Perawat PNS kesehatan,	Jembatan sudah mulai diperbaiki

Sumber : Musrenbang Kelurahan Amal, 2020

Jika dilihat dari data, rata-rata wilayah yang ada di Kelurahan Amal memiliki permasalahan dengan pembangunan infrastruktur khususnya jalan-jalan penghubung, sebagai akses bagi masyarakat. Karena di Kelurahan Amal Bakti itu sendiri akses jalannya sangat tidak memadai untuk masyarakat melakukan berbagai kegiatan, jalan di Kelurahan Amal Bakti itu sendiri masih tanah dan hanya baru sebagian yang diaspal sehingga sedikit kesulitan untuk berpergian jika hujan deras. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Perencanaan Pembangunan infrastruktur di Kelurahan Amal Bakti. Beberapa penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai rujukan, diantaranya:

1. Rasid Pora, dkk (2022) yang berjudul: Peran Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Dalam Percepatan Pembangunan Jalan Penghubung Antar Kelurahan (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tidore Kepulauan), dikatakan bahwa pembangunan jalan penghubung antar kelurahan Cobodoe, kelurahan Kalaodi dan kelurahan Fobaharu diKecamatan Kota Tidore Timur harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, dan instansi terkait, karena jalan merupakan kebutuhan masyarakat yang urjen karena berhubungan langsung dengan aktifitas masyarakat.
2. Yohanis B Kadi, dkk (2020) yang berjudul: Kebijakan Pemerintah Kelurahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus Di Kelurahan Kenjeran, Kecamatan

Bulak, Kota Surabaya), didapati masalah Sering kali timbul hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan, yang mana hambatan tersebut perlu mendapat perhatian baik ditingkat desa maupun kelurahan. Melihat hal tersebut diatas ,diperlukan adanya unsur penggerak yang mampu mengarahkan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan. Pada tataran ini, Lurah memegang peranan yang menentukan.

Dari berbagai permasalahan yang ada dibeberapa wilayah kelurahan mengenai pembangunan infrastruktur, maka penelitian mengenai Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Prencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kelurahan Amal Bakti Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri HILIR, penting dilakukan, mengingat jalan adalah satu infrastruktur yang sangat penting bagi masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Peran Pemerintah

Pemerintah dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Untuk mengemban tujuan negara menurut Ndraha (Labolo, 2010:36), dua fungsi dasar pemerintah adalah:

1. Fungsi primer atau fungsi pelayanan Fungsi primer atau fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa pertahanan dan keamanan, layanan sipil dan layanan birokrasi
2. Fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan Fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Sedangkan, peran pemerintah yaitu:

1. Pemerintah sebagai regulator Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan;
2. Pemerintah sebagai dinamisator Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan

pengarahan secara intendif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluhan maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan;

3. Pemerintah sebagai fasilitator Pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau pemodalannya kepada masyarakat yang diberdayakan.

Peranan pemerintah dewasa ini makin besar bahkan di negara-negara yang menganut kebebasan dan inisiatif usaha swasta yang besar. Peranan pemerintah pun semakin luas sebagaimana terlihat dari pemberian pelayanan umum oleh dinas-dinas pemerintah yaitu mengatur, mendorong, mengoordinir, bahkan membiayai usaha pihak swasta maupun daerahdaerah. Peranan pemerintah lebih sebagai pelayan masyarakat yang tidak bertujuan memeroleh keuntungan atau profit, dimana lebih mementingkan terpenuhinya kepuasaan pelanggan dan bukan memenuhi apa yang menjadi kemauan birokrasi itu sendiri (Labolo, 2010:39).

Peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian (2000: 142-150) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif., melalui pendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.
2. Inovator, dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (legitimacy) yang tinggi.
3. Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif,

landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.

4. Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (role model) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.
5. Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Siagian dalam Mudrajad Kuncoro (2004, 113-114) menyatakan bahwa peran pemerintah dapat mencakup peran-peran wirausaha (entrepreneur), koordinator, fasilitator dan stimulator.

1. Wirausaha (entrepreneur), sebagai wirausaha pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis.
2. Koordinator, pemerintah daerah dapat bertindak sebagai coordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya.
3. Fasilitator, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan.
4. Stimulator, pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut.

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, dalam hal ini adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.

yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi: 2011:9-11).

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu : pembangunan menurut Rogers (Rochajat,dkk: 2011:3) adalah perubahan yang berguna menuju susu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Selanjutnya menurut W.W Rostow (Abdul: 2004:89) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju. Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. (Rochajat,dkk: 2011:3).

Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, pembangunan dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Dan yang lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi. Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok; pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia; manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut.

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (continuity) dan perubahan (change), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat. Akan halnya kecenderungan konsep pembangunan yang dikembangkan di Indonesia Wrihatnolo dan Dwijiwitno (2007 : 12) mengemukakan adanya tahap-tahapan sebagai berikut:

- a. Strategi pertumbuhan
- b. Pertumbuhan dan distribusi
- c. Teknologi tepat guna
- d. Kebutuhan dasar

- e. Pembangunan berkelanjutan dan
- f. Pemberdayaan

Dasar interpretasi pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah asumsi bahw manusia adalah sasaran pokok dan sumber paling strategis, karena itu pembangunan juga meliputi usaha terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia serta mengarahkan minat mereka untuk ikut serta dalam proses pembuatam keputusan tentang berbagai hal yang memiliki dampak bagi mereka dan mencoba mempromosikan kekuatan manusia, bukan pengabdian ketergantungan yang menciptakan hubungan antara birokrasi , negara dengan masyarakat. Dari penjelasan elemen-elemen diatas maka muncullah teori pemberdayaan (*empowerment*) yang diapandang sebagai pemaknaan alternatif terhadap pembangunan. Untuk mewujudkan delapan kondisi utama di atas , (Mardikanto Totok dan Poerwoko Soebianto, 2013:20) Menawarkan tiga komponen penting dalam pembangunan manusia yaitu:

- a. Kesetaraan dalam memperoleh kesempatan (*Equal Acess To Oportunity*)
- b. Berkelanjutan (*Sustainability*) dipahami bahwa generasi yang akan datang harus bisa menikmati kesempatan yang sama dengan generasi sekarang
- c. Produktifitas (*Productivity*) hal ini dibutuhkan investasi pada pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan set-up ekonomi makro untuk memfasilitasi pengembangan SDM.
- d. Pemberdayaan (*Empowerment*) yang diterjemahkan bahwa masyarakat memiliki pilihan untuk kepentingan sendiri, sehingga mereka harus bisa mempengaruhi keputusan yang terkait dengan hidup mereka.

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekat suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional, demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Untuk mencapai “kehidupan yang serba lebih baik” semua masyarakat minimal harus memiliki tiga tujuan inti sebagai berikut (Todaro, 2000: 28):

- a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok , seperti pangan , sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan.
- b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemua itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil , melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.

- c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara, bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka

Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terncana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencantumkan tujuan pembangunan nasionalnya. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan yang selalu menjadi cita-cita seluruh bangsa di dunia ini.

Perencanaan

Perencanaan menurut Abe (2001, 43) tidak lain dari susunan (rumusan) sistematis mengenai langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan, proses perencanaan merupakan sebuah proses yang dilakukan dalam rangka mencapai sebuah kestabilan. Sehingga setiap aktivitas yang ada di dalamnya merupakan usaha yang dilakukan memiliki titik fokus untuk mencapai satu kondisi keseimbangan dalam konteks problem solving, future oriented dan resource allocation. Sistem perencanaan nasional dirancang untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan mengikat semua tingkatan pemerintahan. Namun, masing-masing rencana memiliki cakupan dana berbeda-beda. Dilihat dari tingkatan pemerintahan, sistem perencanaan pembangunan nasional memuat : (1) Perencanaan Pusat; dan (2) Perencanaan Daerah.

Menurut Terry (dalam Riyadi, 2005 : 3), perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenal masa yang akan datang dengan jalan mengambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang di perhatikan untuk mencapai hasil yang di inginkan. Defenisi perencanaan dapat diartikan hubungan antara apa yang ada sekarang (*what is*) dengan bagaimana seharusnya (*what should be*) yang bertalian dengan kebutuhan penentuan tujuan, prioritas program, dan alokasi sumber.

Soetomo (2009:166) mengartikan pembangunan masyarakat adalah proses perubahan menuju pada suatu kondisi yang lebih baik. Dengan demikian, peningkatan taraf kehidupan dapat pula diartikan sebagai tujuan yang hendak dicapai melalui proses pembangunan masyarakat. Maka menurut Soetomo dikatakan peningkatan taraf kehidupan dianggap sebagai tujuan maka sebetulnya juga dapat

diposisikan sebagai indikator untuk melihat keberhasilan proses pembangunan masyarakat tersebut. Sebagaimana telah disebutkan tentang pengertian pembangunan masyarakat.

Soetomo (2009:168) mengatakan pembangunan cenderung dinyatakan cukup membawa hasil apabila mampu untuk mengurangi proporsi jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien. Nitisastro (2014:92) memperincikan apa yang tercakup dalam perencanaan pembangunan,yaitu: 1. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Atas dasar nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan. 2. Pilihan diantara cara-cara alternaif yang efisien dan rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Perencanaan dan pembangunan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, ibarat satu tubuh yang diantara satu organ dengan organ lainnya memiliki keterhubungan yang melekat, karena pembangunan membutuhkan perencanaan dan perencanaan harus mewujud dalam pembangunan, mulai dari pemerintahan pusat sampai pada tingkat pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah seharusnya mencerminkan kebutuhan realitas suatu daerah, sebagaimana dinyatakan Kuncoro (2012:43), bahwa perencanaan pembangunan daerah tidak hanya perencanaan dari suatu daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan daerah berfungsi sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya-sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut. Sehingga menjadi penting dalam proses penyusunannya dan harus bersifat aspiratif dan menggunakan pendekatan perencanaan yang tepat.

METODE PENELITIAN

Adapun Teknik analisis dalam penelitian ini adalah dengan memaparkan hasil wawancara secara deskriptif kualitatif, apabila semua data telah terkumpul maka semua data akan dipilah dan dianalisis sesuai fakta dilapangan, peneliti juga menyusun kata dan kalimat untuk memaparkan hasil wawancara dengan semua informan sehingga mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data model Miles dan Huberman. Analisa data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisa kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya

sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

1. Reduksi Data. Menurut Sugiyono (2012:247) mereduksi data berarti memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan pokoknya. Dengan demikian data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
2. Penyajian Data. Penyajian data dirancang untuk menggabungkan informasi dalam suatu bentuk yang padu dan mudah dipahami. Menurut Sugiyono (2012:249) dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.
3. Kesimpulan/ verifikasi. Menurut Sugiyono (2012:252), kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Hal ini karena masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilapangan. Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek dalam bentuk hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2012:253). Kesimpulan-kesimpulan di verifikasi dengan menguji kebenaran, kekuatan dan kecocokan makna-makna yang muncul dari data untuk menguji validitas makna-makna tersebut. Apabila ada display yang telah dikemukakan sebelumnya telah didukung oleh data-data yang mantap, maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel.

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca serta diinterpretasikan dalam menganalisa data, data dalam penelitian ini menggunakan analisa triagulasi yaitu mengumpulkan data melalui wawancara serta melihat keabsahan data yang diperoleh melalui catatan dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Stabilisator

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa bahwa pemerintah kurang mampu untuk lebih selektif melihat pembangunan yang prioritas, bahkan setelah di musrenbang pembangunan yang harusnya menjadi prioritas di alihkan kepada pembangunan lainnya Dari hasil observasi penelitian maka dapat dianalisa bahwa pemerintah melakukan musrenbang dalam menentukan prioritas pembangunan namun masyarakat menganggap bahwa tidak semua pembangunan yang dilakukan khususnya pembangunan jalan adalah pembangunan yang prioritas, bahkan beberapa pembangunan yang terjadi diluar musyawarah Kemudian

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dianalisa bahwa sosialisasi belum efektif, karena tidak ada sosialisasi khusus yang dilakukan pihak kelurahan bakti amal kepada masyarakat mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan, harusnya Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait program dan tata cara pelaksanaannya, sehingga target baik volume maupun kualitas tercapai dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Inovator

Ditemukan bahwa Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat diketahui bahwa di Kelurahan Amal Bakti, pemerintah kelurahan bersama-sama masyarakat dan aparatur kelurahan lainnya melakukan inovasi terhadap pembangunan, pembangunan kelurahan memiliki tujuan kesejahteraan masyarakat, pembangunan harus terencana dengan baik berdasarkan hasil analisis atau kajian yang menyeluruh terhadap segenap potensi dan permasalahan yang dihadapi. Untuk mewujudkan pembangunan yang terencana, maka pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan.

Modernisator

Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui dalam membangun desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pelopor

Ditemukan bahwa Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dianalisa bahwa pembangunan jalan di kelurahan amal bakti sudah melihat keadaan lingkungan, karena pembangunan ini, jika tidak benar-benar di perhatikan maka akan menimbulkan dampak yang tidak sedikit baik bagi kualitas lahan maupun bagi masyarakat secara lansung. Meski demikian, pemahaman masyarakat terhadap perlindungan lingkungan belum mengarah pada kemungkinan-kemungkinan dampak kerusakan pada jangka yang panjang.

Pelaksana Sendiri

Ditemukan bahwa Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui bahwa adanya dana dalam pembangunan, Dana Kelurahan yang lebih tepat disebut dengan Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dukungan pendanaan bagi kelurahan di

kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan, dalam pengalokasian DAU Tambahan, seluruh kabupaten dan kota penerima akan dikelompokkan menjadi 3 kategori berdasarkan kualitas pelayanan publik dan dihitung secara proporsional sesuai jumlah kelurahan pada daerah dimaksud.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan yaitu Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kelurahan Amal Bakti Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir belum optimal, hal ini dikarenakan masih banyaknya pembangunan infrastruktur yang masih rusak, pemerintah melakukan musrenbang dalam menentukan prioritas pembangunan namun masyarakat menganggap bahwa tidak semua pembangunan yang dilakukan khususnya pembangunan jalan adalah pembangunan yang prioritas, bahkan beberapa pembangunan yang terjadi diluar musyawarah, kemudian sering kali di temui hambatan dalam sebuah program adalah pada permasalahan sosialisasi program yang kadangkala kurang dalam memberikan informasi pada masyarakat desa ataupun sebaliknya masyarakat desa kurang merepons atau ikut berpartisipasi dalam program yang digalakkan oleh pemerintah. Pemerintah kelurahan saat ini dalam pembangunan jalan dikelurahan Amal Bakti belum sepenuhnya melihat kebutuhan masyarakat, masyarakat merasakan masih sulitnya akses dari kelurahan ini khususnya jalan-jalan yang sudah banyak rusak menghambat kegiatan masyarakat, diketahui bahwa untuk jalan di Kelurahan Amal Bakti banyak sekali yang masih dalam keadaan rusak, bahkan tidak di aspal, beberapa jalan bahkan sangat parah dan sulit lalui. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Seringkali dalam proses perencanaan pembangunan, tidak menghasilkan sebuah perencanaan yang baik, atau perencanaan yang tidak sesuai dengan tujuan pembangunan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander, 2001, Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat. Dalam Otonomi Daerah, Lappera Pustaka Utama , Yogyakarta.
- Adisasmita, Rahardjo, 2006, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Herbin F. Betaubun, Jeni Paresa . 2019. Analisa Kerusakan Jalan Menggunakan Metode Pci Dan Asphalt Institute Ms-17. Mustek Anim Ha Vol. 8 No. 2, Agustus 2019 e-ISSN : 2354-7707 p-ISSN 2089-6697

I Ketut Sumadiasa, Ni Made Tisnawati, I G.A.P. Wirathi (2016) Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan, Listrik Dan Pma Terhadap Pertumbuhan Pdrb Provinsi Bali Tahun 1993-2014. E-Jurnal EP Unud, 5 [7] : 925 – 947 ISSN: 2303-0178

Ismatullah, Deddy. 2015. Ilmu Negara dalam Multi Perspektif. Bandung: Pustaka Setia.

Kadi, Y. B., & Rahmanto, A. (2020). F. Kebijakan Pemerintah Kelurahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus Di Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya). Inovasi Manajemen dan Kebijakan Publik, 3(2), 52-52.

Kuncoro, Mudrajat, 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Erlangga.

Labolo, Muhamad. 2010. Memahami Ilmu Pemerintahan, Rajawali Press, Edisi 6,. Jakarta.

Mardikanto,Totok.2013.pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik.Bandung: Alfabeta.

Nitisastro, Widjojo. 2014. Manajemen Pemerintahan, Yayasan Penerbit Adm, Jakarta.

Pranessy, Lise. Nurazi, R. 2012. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu. Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan, Vol. 04 No. 03.

Pramono, Sidik. A. 2011. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Listrik terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Tahun 1994-2008. Jakarta: Universitas Indonesia. Tesis tidak dipublikasikan.

Pora, R., Ibrahim, A. H., & Tubuli, M. R. S. (2022). Peran Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Dalam Percepatan Pembangunan Jalan Penghubung Antar Kelurahan (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tidore Kepulauan). Jurnal Government Of Archipelago-Jgoa, 3(1), 21-27.

Posumah, Ferdy. 2015. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Investasi di Kabupaten Minahasa Tengara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol.15 No.02.

Rizky A. Prasojo, Luluk Fauziah dengan judul Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. JKMP (ISSN. 2338-445X), Vol. 3, No. 1, Maret 2015, 1-116

- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rochajat. Dkk. 2011. Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kaji Ulang, dan Teori Kritis. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siagian, Sondang. 2000, Administrasi Pembangunan, Bumi Aksara.
- Soetomo. 2009. Pembangunan Masyarakat "Merangkai Sebuah Kerangka". Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Subandi. 2011. Ekonomi Pembangunan. Bandung: Unit Penerbit Alfabetika.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alphabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2014. Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjokroamidjojo. 2000. Perencanaan Pembangunan, Masagung, Jakarta.
- Tjokrowinoto M. 2000. Pembangunan : Dilema dan Tantangan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- Todaro. Michael P. 2000. "Pembangunan Ekonomi". Jakarta: Bumi Aksara.
- Wasistiono & Tahir, M. Irwan. 2006. Prospek Pengembangan Desa.. Fokusmedia. Bandung.
- Widjaja. 2004. Otonomi Desa. Rajawali Pers : Jakarta.
- Wrihatnolo dan Dwidjowijoto. (2007). Manajemen Pemberdayaan. Jakarta: Elex. Media Komputindo.